

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mempengaruhi perubahan ke arah yang lebih dikenal sebagai pembangunan. Pemerintah sekarang bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi karena globalisasi. Salah satu indikator perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi (Marlina & Iskandar 2019). Pertumbuhan ekonomi terkait Covid-19 harus diperhatikan untuk membangkitkan perekonomian dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Data pertumbuhan ekonomi, utang rumah tangga, dan kriminalitas di Kabupaten Buleleng tahun 2020 hingga 2023.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi, Presentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Buleleng, Tahun 2020-2023

| Keterangan | Tahun | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pertumbuhan Ekonomi | -5,80 | -1,27 | -3,11 | - |
| Presentase Penduduk Miskin | 5,32 | 6,12 | 6,21 | 5,85 |
| Tingkat Pengangguran | 5,19 | 5,38 | 5,2 | 3,6 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Bali 2023

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah cara usaha masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan perekonomian. Peran mereka dalam perekonomian nasional sangat strategis, dan UMKM mempunyai

peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian suatu bangsa (Utami, 2022). Bisnis kecil dan menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan mengurangi jumlah jam kerja yang diperlukan. UMKM adalah usaha yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih minimal Rp50.000.000,00 atau Rp300.000.000,00;
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak memiliki cabang perusahaan dan memiliki kekayaan bersih antara 50.000.000,00 dan 500.000.000,00 dan hasil penjualan tahunan antara 300.000.000,00 dan 2.500.000.000,00.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan dan memiliki kekayaan bersih antara Rp500.000.000,00 dan Rp10.000.000.000,00 dan hasil penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000 ,00 dan Rp50.000.000.000,00.

Sebagai sumber daya ekonomi utama, UMKM sangat penting dalam mendistribusikan produk domestik bruto dan mendorong tenaga kerja (Septiani & Wuryani, 2020). UMKM merupakan usaha yang menambah jam kerja dan

memberikan pelayanan perekonomian masyarakat. UMKM dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional (Puji Hastuti dkk 2020). Lembaga keuangan memberikan kredit kepada UMKM, yang sangat membantu mereka menjalankan bisnis mereka (Yanti, 2019).

Kemampuan self-assessment UMKM dalam mengelola uang terbatas. Setelah memperoleh keuntungan, para pelaku UMKM memanfaatkannya untuk kegiatan konsumtif guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterampilan pengelolaan uang yang profesional sangat penting bagi pertumbuhan dan keberhasilan UMKM. Oleh karena itu, mahasiswa UMKM harus memahami sastra dan inklusi (Dahrani dkk, 2022).

Oleh karena itu, pada tanggal 30 November 2022, DisdagperinkopUKM Buleleng membentuk Tim Koordinasi Percepatan UMKM Naik Kelas dengan dukungan mahasiswa, asosiasi, dan komunitas UMKM dan perguruan tinggi di divisi untuk melaksanakan program Pemkab.Buleleng. Salah satu program dari Tim Koordinasi adalah “Mewujudkan UKM Buleleng yang Tangguh, Adaptif, Inovatif, dan Berkolaborasi melalui Gema UKM Buleleng, yang akan mendukung transformasi ekonomi Kerti Bali” GEMA (Gerakan Maju) yang dilaksanakan setiap tahun mulai tahun 2022, akan mengikutsertakan UMKM Produktif di Tim Koordinasi Percepatan UMKM Naik Kelas juga memberikan konseling kepada UMKM yang mengalami kendala dalam menyelesaikan tugasnya. Gema bertujuan untuk meningkatkan kualitas Buleleng dengan beralih dari perbankan tradisional dan metode pembayaran ke platform digital.

Untuk melanjutkan program UMKM Naik Kelas tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng dan DisdagperinkopUKM merancang sebuah layanan konseling yang diberi nama PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) untuk mewadahi UMKM serta mempermudah UMKM dalam menjalankan usahanya. PLUT Buleleng secara resmi beroperasi pada tanggal 29 Mei 2023, yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Singaraja. PLUT mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Pelayanan Informasi dan Konsultasi

Pelaku UMKM mendapatkan informasi dan konsultasi dari PLUT tentang berbagai aspek usaha, perizinan, perpajakan, peluang bisnis, dan regulasi terbaru.

2) Perizinan dan Administrasi

PLUT dapat membantu UMKM dalam proses perizinan dan administrasi yang diperlukan untuk memulai maupun mengembangkan usahanya.

3) Pemberian Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan

Pelatihan dan program pengembangan keterampilan biasanya disediakan oleh PLUT untuk pelaku usaha. Ini dapat mencakup pelatihan dalam manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan topik lain yang relevan.

4) Pengembangan Pasar

PLUT dapat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) memasarkan produk mereka melalui berbagai program, pameran, atau kegiatan promosi. PLUT dapat membantu mereka terhubung dengan pasar lokal, nasional, atau internasional.

5) Bimbingan Teknis dan Manajerial

Pelaku UMKM dapat mendapatkan bantuan teknis dan manajemen tentang cara mengembangkan inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan proses produksi.

6) Sertifikasi dan Standarisasi

PLUT membantu UMKM untuk memenuhi standarisasi produk serta sertifikasi kelayakan produk.

7) Peningkatan Strategi

Peningkatan sinergi dengan kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan UMKM agar dapat bersaing.

PLUT menjalankan program harian “PLUT Bisnis Konseling” yang memuat topik berbeda setiap harinya. Selain itu, mendukung transformasi digital UMKM. DisdagperinkopUKM menjalankan “Bulelengku.” toko internet. Toko online ini dapat diakses melalui mybuleleng.com. Untuk membeli produk UMKM di Mall KUMKM Buleleng. Merchant Platform Digital berfungsi sebagai landasan dalam pengembangan toko online. Toko online ini juga akan dilengkapi manajemen untuk mengelola stok dan menghasilkan keuntungan bagi UMKM. Kolaborasi antara Kominfosanti, Pertanian, Pangan, dan Perikanan Buleleng, dan BPD Bali.

TP2DD Kabupaten Terbaik Wilayah Jawa-Bali diberikan pada tahun 2022. Dengan mengembangkan dan menegakkan peraturan serta menyiapkan saluran perbankan elektronik. TP2DD berinteraksi dengan OJK, BI, atau BPD. Pada tanggal 30 Maret 2021 telah diluncurkan Digitalisasi Pasar Berbasis QRIS di Pasar Banyuasri. Upaya untuk berpartisipasi dalam revolusi teknologi keuangan 4.0, terutama selama pandemi COVID-19, adalah pasar berbasis QRIS. Bermodal

smartphone, pembeli dan penjual bisa langsung bertransaksi melalui aplikasi QRIS. Pembayaran dengan aplikasi ini cepat dan sederhana.

Karena banyaknya risiko penggunaan produk keuangan berteknologi tinggi tanpa pengetahuan dan pemahaman, maka harus diimbangi dengan literasi keuangan berteknologi tinggi. Literasi keuangan yang tinggi menjadi syarat bagi seluruh mahasiswa UMKM agar terhindar dari permasalahan keuangan. Banyak orang mengatakan bahwa rendahnya pendapatan per orang menyebabkan perekonomian buruk; Namun, masalah keuangan terjadi karena kesalahan dalam pengelolaan uang, seperti kesalahan pengguna. Untuk memiliki kehidupan yang bermakna, Anda memerlukan literasi keuangan yang tinggi. (2017) Huriyatul dan Yogi

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tiga tahun sekali. Hasil SNLIK 2022 di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari survey 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019. Berikut tabel hasil survei Provinsi Bali pada tahun 2019 dan 2022.

Tabel 1.2
Hasil Survey SNLIK di Provinsi Bali Tahun 2019-2022

| Keterangan | Literasi Keuangan | Inklusi Keuangan |
|------------|-------------------|------------------|
| 2019 | 38,06 | 92,91 |
| 2022 | 57,66 | 92,21 |

Sumber: Publikasi hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019-2020

Menurut survei, inklusi keuangan dan literasi keuangan di Bali meningkat dari tahun 2019 hingga 2022, merupakan bahwa kinerja pemerintah tentang literasi dan inklusi keuangan menghasilkan hasil karena perbandingan hasil survei literasi jauh di bawah inklusi keuangan. Untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor

tersebut, masyarakat harus lebih mengenal produk dan layanan keuangan. Literasi dan inklusi keuangan dipisahkan karena transaksi keuangan digital tidak mempertimbangkan risiko keamanan data pribadi. Dengan demikian, ketika masyarakat kurang memahaminya, mereka akan merasakan risiko finansial yang lebih besar. (Ombudsman Keuangan 2019)

OJK menggunakan beberapa indikator untuk mengukur literasi dan inklusi dalam survei ini. Lima ukuran yang digunakan untuk menilai literasi keuangan: pengetahuan, keterampilan, sikap terhadap lembaga keuangan, dan pengetahuan dan aktivitas keuangan. Dengan cara yang sama, masyarakat yang inklusif secara finansial didefinisikan sebagai masyarakat yang memanfaatkan barang dan jasa yang dapat diukur selama dua belas bulan terakhir dari periode survei. (Otoritas Jasa Keuangan 2019 dan 2020). Menurut SNKI 2020, terdapat tiga jenis kelompok indikator pencapaian tujuan utama keuangan: akses, pemanfaatan, dan kualitas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan sebagai “pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang mempengaruhi pengetahuan dan tindakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan; literasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas keputusan keuangan individu atau bagaimana individu mengubah keterampilan dan perilakunya dalam pengelolaan keuangan sehingga mereka dapat memilih dan menggunakan lembaga, produk, dan layanan keuangan yang mereka inginkan”

Peneliti melakukan survei kepada beberapa pegawai UMKM Produktif di wilayah Kota Singaraja untuk menghasilkan hasil survei. Berdasarkan survei terhadap 10 orang yang dilakukan oleh seorang peneliti. Tujuh mahasiswa UMKM

belum memanfaatkan fintech untuk mengelola uangnya, namun 100% yakin mereka bisa mengaksesnya dengan mudah. Sedangkan untuk literasi keuangan, hanya tiga dari enam responden yang mengetahui atau pernah mengikuti seminar tentang pengelolaan keuangan, namun dua orang tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bisnis, karena pengelolaan keuangan itu penting. Tujuh mahasiswa UMKM tidak menyediakan fasilitas pembayaran cashless padahal kita tahu banyak manfaat pembayaran cashless untuk jual beli.

Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana literasi dan teknologi mempengaruhi inklusi keuangan UMKM. Penelitian ini menggunakan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Teknologi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Produktif di Kecamatan Buleleng”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang disebutkan di atas, masalah berikut dapat diidentifikasi:

- 1) Tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng masih tergolong rendah.
- 2) Kurangnya pemahaman tentang teknologi keuangan bagi pelaku UMKM untuk menunjang aktivitas keuangan usaha serta banyaknya hambatan yang dilalu pelaku UMKM dalam mengakses fitur-fitur dari teknologi keuangan.
- 3) Belum memanfaatkan perbankan dalam permodalan ataupun menyimpan keuangan usaha.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, penelitian ini akan fokus pada variabel yang digunakan peneliti. Penulis akan fokus pada bagaimana literasi keuangan dan teknologi berdampak pada inklusi uang pada usaha kecil dan menengah yang produktif di Kecamatan Buleleng.

1.4. Rumusan Masalah

Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah literasi keuangan dan *teknologi keuangan* mempengaruhi inklusi keuangan UMKM Produktif di Kec. Buleleng?
- 2) Apakah literasi keuangan mempengaruhi inklusi keuangan UMKM Produktif di Kec. Buleleng
- 3) Apakah Teknologi Keuangan mempengaruhi inklusi keuangan UMKM Produktif di Kec. Buleleng?

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian Berdasarkan latar belakang dan merumuskan masalah saat ini, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menguji hal-hal berikut:

- 1) Meneliti bagaimana literasi keuangan dan teknologi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan Produktif UMKM di Kecamatan Buleleng?
- 2) Meneliti hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan UMKM di Kecamatan Buleleng
- 3) Meneliti bagaimana teknologi keuangan mempengaruhi keuangan inklusi terhadap usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Buleleng?

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Tujuan penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan tentang dampak literasi keuangan dan teknologi terhadap keuangan inklusi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng. Selain itu, penelitian ini dapat menyempurnakan literatur yang ada untuk keperluan penelitian lanjutan.
- 2) Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi tahu UMKM di Kabupaten Buleleng tentang pentingnya memahami pengaruh literasi keuangan dan teknologi keuangan terhadap inklusi keuangan. karena, seperti yang ditunjukkan oleh hasil survei sebelumnya, masyarakat Indonesia kurang memahami dan terlibat dalam keuangan.

